

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Indonesia dan Jepang dimulai pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang (www.id.emb-japan.go.jp). Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan ganti rugi Jepang terhadap Indonesia, yang dilakukan melalui penanaman modal serta proyek pembangunan yang dibiayai oleh Jepang. Walaupun perjanjian ini tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia, tapi ini merupakan awal baru hubungan antara Indonesia dan Jepang.

Sekitar tahun 2000, Jepang mulai menggunakan konsep kerjasama ekonomi bilateral yang disebut *Economic Partnership Agreement* (EPA) dan merupakan konsep yang dibutuhkan setiap negara agar tidak tertinggal. Pada 24 Juni 2003, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dan Presiden Megawati mulai mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan kemitraan ekonomi bilateral yang ada antara Jepang dan Indonesia. November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe, sepakat untuk membahas pembentukan EPA. Sebagai langkah awal, diadakannya *Joint Study Group Meeting* (JSG) yang diadakan sebanyak 3 kali pertemuan informal dengan hasil rekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), diikuti dengan negosiasi sebanyak 6 putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006. (www.mofa.go.jp)

Pada akhir negosiasi November 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator*, Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yabunaka menandatangani *Record of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian. Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah

dilakukan negosiasi akhir dalam kerangka *wrap up meeting*. Hasil negosiasi tersebut berupa *Record of Discussion* yang disepakati sebagai landasan bagi langkah selanjutnya.

Setelah melalui banyak proses negosiasi, Jepang dan Indonesia sepakat membangun kerjasama ekonomi bilateral yang disebut *Indonesia Japan Economy Partnership Agreement* (IJEPA). Ditandatangani pada 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Dan sejak 1 Juli 2008 secara resmi mulai direalisasikan di kedua negara. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia. IJEPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat *World Trade Organization plus* (WTO plus) ditambah peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai bagian dari *Partnership Agreement*. (www.mofa.go.jp)

IJEPA bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang memiliki tiga pilar, yaitu *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Facilitation* (pasar yang terbuka atau dipermudah) dan *Cooperation* (kerjasama untuk peningkatan kapasitas). Untuk menjamin keberhasilan realisasi IJEPA, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian, telah menerapkan beberapa strategi. Pertama, Sektor Penggerak (*Driver Activities*) yang telah disepakati dan didapatkan pemahaman bersama bahwa sektor otomotif (*automotive & autoparts*), elektrikal & elektronik (*electrical* atau *electronics & parts*), dan alat berat (*construction machineries*) merupakan sektor penggerak utama (*drivers*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. (Atmawinata & all, p. 2)

Kedua, Program Kesejahteraan (*Prosperity Program*) yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui pembukaan akses pasar Jepang yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia, dan juga peningkatan ekspor ke mancanegara. Program ini juga disertai dengan peningkatan investasi baru dari Jepang yang diikuti dengan pembangunan atau

peningkatan kapasitas (*capacity building*) industri, khususnya dalam rangka peningkatan daya saing industri manufaktur. (Atmawinata & all, 2008, p. 2)

Dan ketiga, Pusat Pengembangan Industri Manufaktur atau *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC). Didalam realisasi IJEP, MIDEC berfungsi sebagai motor pembangunan kapasitas industri (*industrial capacity building*) guna meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia. Dalam skema MIDEC terdapat 13 sektor industri yang terdiri dari sektor industri penunjang (*cross sektoral*), sektor industri khusus (*specific sektor*) dan sektor industri atau kegiatan yang menciptakan lapangan kerja sebagai pemacu peningkatnya kesejahteraan. Sektor-sektor yang dimaksud adalah: A) Sektor Industri Penunjang (*Cross Sektoral*) mencakup, Industri pengerjaan logam (*metal working*), Industri Mould & Dies, Pengelasan (*welding*), Konservasi energi (*energy conservation*); B) Sektor industri khusus (*specific sektor*) mencakup, Industri *Automotive*, Industri *electric* atau *electronics*, Industri baja & produk baja, Industri tekstil, Industri bukan baja dan Industri makanan & minuman, Industri petrokimia & kimia oleo (*petro & oleo chemical*); C) Sektor industri atau kegiatan yang menciptakan lapangan kerja mencakup, Industri kecil dan menengah (*small and medium-scale enterprises (SMEs)*) Promosi investasi dan ekspor industri (*investment & industrial export promotion*). (Atmawinata & all, 2008, p. 2)

Melalui program *Cooperation* pihak Jepang sepakat memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas industri Indonesia. Hal ini terkait untuk memajukan sektor penggerak yang merupakan *common interest* bagi kedua belah pihak. Indonesia telah mempercepat pemberian fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dan Jepang membantu untuk peningkatan kapasitas industri manufaktur Indonesia melalui MIDEC. Untuk meningkatkan kapasitas industri manufaktur tersebut, Jepang akan berkerjasama dalam tiga bidang kegiatan pokok, yaitu, Study Dasar (*Basic Study*), Pelatihan (*for trainee & trainer*) dan Teknologi (*Technical Assistance*). (Atmawinata & all, 2008, p. 26)

Pusat Pengembangan Industri Manufaktur atau MIDEK merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Jepang sebagai kompensasi dari IJEPA. Dengan mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas industri manufaktur Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing produk manufaktur berbasis pasar internasional. Terdapat beberapa tujuan strategis yaitu, untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia sebagai basis produksi produk manufaktur Jepang, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri manufaktur, meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui *prosperity development program*, menjalin jaringan antar aktor pengembang industri manufaktur melalui *virtual network organization*, Indonesia dapat menjadi mitra strategis Jepang dipasar internasional, dan menjalin kerjasama jangka panjang dalam pengembangan industri manufaktur. (Atmawinata & all, 2008, p. 47)

Sesuai dengan kesepakatan lingkup kerjasama untuk mendorong peningkatan daya saing industri di Indonesia melalui MIDEK yang mencakup tiga belas sektor kegiatan. Diawali dengan kesepakatan pada perundingan 10 November 2006, "*Consolidated Paper on Initiative for Manufacturing Industry Development Center*" dimana kedua belah pihak setuju bekerjasama untuk industri-industri yang bersifat *cross sektoral* dan *specific sektor*. Selanjutnya, kesepakatan berkembang menjadi 26 proyek kerjasama industri yang meliputi 13 sektor. Akhirnya pada saat kesepakatan IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007, 26 proyek kerjasama IJEPA dijabarkan menjadi 94 aktivitas yang meliputi 13 sektor kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. Kolom berikut merincikan dua puluh enam proyek kegiatan yang telah disepakati dalam IJEPA, dan gambar yang memperlihatkan keterkaitan antara 13 sektor kegiatan dan 4 sektor industri penggerak kerjasama IJEPA. (Atmawinata & all, 2008, p. 50)

Kolom 1. 26 Proyek yang disepakati dalam IJEPA

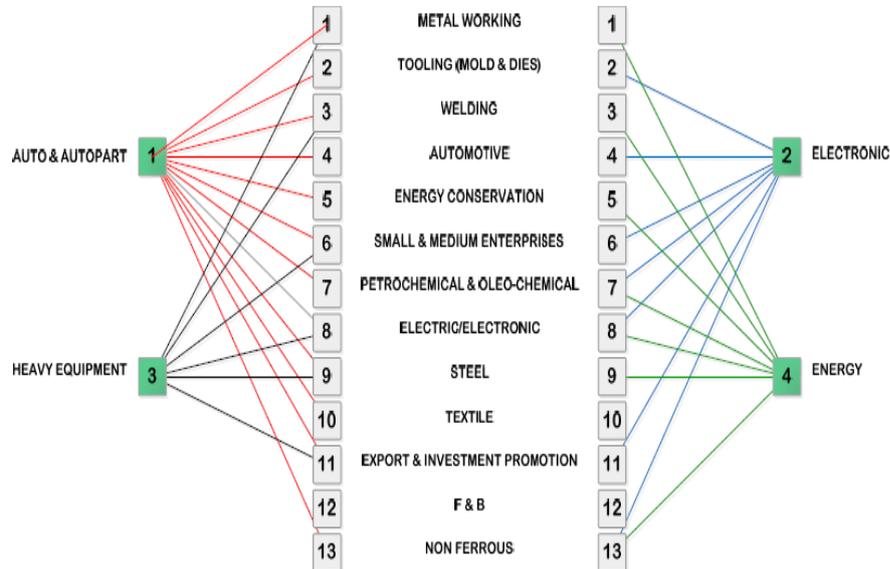
"Proyek Kerjasama di bawah Prakarsa untuk Pengembangan Industri Manufaktur"

1. Dukungan untuk Meningkatkan Teknologi terkait Pengerjaan Logam.
2. Dukungan untuk Meningkatkan Kapasitas Pasokan Lokal untuk Perkakas (yaitu *Mould & die*).
3. Pelaksanaan Program Dukungan Peningkatan Teknologi Pengelasan.
4. Perumusan Studi Promosi Konservasi Energi (disepakati dalam bab sumber energi dan mineral).
5. Dukungan untuk Pembentukan Sistem Kebijakan Konservasi Energi.
6. Konsultasi dengan Industri Konsumsi Energi Tinggi untuk Konservasi Energi.
7. Dukungan untuk pengenalan Tempat Pembakaran Efisiensi Tinggi atau Fasilitas yang diciptakan oleh Jepang untuk mengurangi emisi CO₂ dan konsumsi energi.
8. Memberikan Informasi Tentang Model Bisnis Jenis Baru Untuk Mendorong Konservasi Energi.
9. Memperkuat Organisasi Promosi Ekspor dan Daya Saing Ekspor.
10. Membantu Usaha Pencocokan Antara Perusahaan Jepang dan Perusahaan Indonesia.
11. Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk UKM.
12. Study Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk UKM.
13. Membantu Promosi Penjualan dengan Meningkatkan Desain Produk Lokal dan Melaksanakan Kampanye "*One Village One Product*".
14. Melaksanakan Studi Kelayakan oleh para ahli dari *Japan Automobile Research Institute* tentang Kerjasama R&D, dan mengevaluasi kemampuan lembaga pengujian di Indonesia untuk mendukung penguatan sistem R&D.
15. Dukungan untuk tersedianya peraturan teknis yang diperbaharui mengenai kesesuaian pengujian yang diperlukan agar Indonesia dapat mengadopsi / mengikuti kesepakatan internasional seperti kesepakatan UN / ECE 1958

dengan mengirimkan pakar teknis pemerintah.

16. Dukungan untuk Perbaikan produsen bagian mobil lokal dalam manajemen produksi & kontrol kualitas dan lain-lain dengan memperluas Program Pelaporan Pakar Keliling saat ini. *Dalam kerangka program sebelumnya, Indonesia dan Jepang akan berkonsultasi lebih lanjut mengenai bidang pelatihan ini termasuk kemungkinan untuk mendukung sistem sertifikasi keterampilan.
17. Sertifikasi Keselamatan pada Produk Teknik Elektro (Skema IECEE / CB).
18. Dukungan untuk Pendirian Strategi Industri Baja Indonesia.
19. Pendaftaran untuk Penggunaan Paten "DIOS", dan study lebih lanjut dari langkah-langkah fasilitasi tambahan untuk mentransfer teknologi DIOS termasuk pengenalan strategi yang berkaitan dengan penggunaan praktis dari paten ini.
20. Produksi Bersih di Industri Baja.
21. Dukungan untuk Pengenalan tempat Pembakaran Efisiensi Tinggi atau Fasilitas yang Diciptakan oleh Industri Baja Jepang.
22. Kerjasama Tekstil untuk pengembangan kapasitas untuk perbaikan teknologi, penguatan ekspor ke pasar Jepang, peningkatan kemampuan sistem pengujian dan sertifikasi, menetapkan strategi industri tekstil Indonesia, terbukti dan efisien.
23. Kerjasama Komersialisasi Bukti Bahan Bakar Bioteknologi di Industri Kimia.
24. Dukungan untuk studi tentang analisis keadaan sekarang industri Non Ferrous di Indonesia, dan melaksanakan studi kelayakan tentang kerjasama.
25. Mempromosikan Investasi Industri Non Ferrous di Indonesia untuk Potensial Investor Jepang.
26. Kerjasama untuk Industri Makanan dan Minuman di bawah Inisiatif Pusat Pengembangan Industri Manufaktur. (MIDEC)

Gambar 1. Hubungan antar Sektor dengan *Drive Sektor*



Sumber: Kajian *Capacity Building* Industri Manufaktur Melalui Realisasi MIDEK-IJEPa tahun 2008 oleh Kementerian Perindustrian

MIDEK difokuskan untuk membangun ketertinggalan atau penguatan berbagai industri penunjang (*supporting industries*) yaitu industri-industri pembuat komponen dan *parts*, serta penguatan berbagai *common facilities*, seperti penguatan berbagai balai uji dan sistem sertifikasi, balai atau fasilitas pelatihan sumber daya manusia, pengembangan atau pengadopsian standar, sistem sertifikasi dan penjaminan kualitas produk, peningkatan teknik produksi, peningkatan manajemen, berbagai program pelatihan bagi sumber daya manusia baik di balai-balai industri dan juga bagi berbagai lembaga atau universitas terutama milik pemerintah, maupun berbagai asosiasi industri.

Realisasi ini telah dijalankan sesuai dengan kesepakatan yaitu di tahun 2008. Setiap sektor kegiatan yang ada telah menjalankan program kerjanya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membuat perencanaan kerja dan anggaran biaya tahun per tahun, penyusunan *Term Of Reference* (TOR) untuk kegiatan masing-masing program, *basic study*, *Workshop* & pelatihan-pelatihan dan sertifikasi personil di Indonesia atau Jepang, *training for trainer* – untuk

meningkatkan potensi SDM Industrial, *expert dispatch*, seminar, upaya penyusunan *quality-manual*, standar kurikulum-pelatihan, dan sebagainya. (Atmawinata & all, 2009, p. 49)

Program MIDEDEC tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai 2010. Dari 13 sektor, program ini direalisasikan hanya pada 11 sektor, yaitu *metal working, welding, electronics, aluminium (non-ferrous), small and medium industries, mould and dies, automotive, heavy equipment, steel, and food and beverages. Oleochemicals and petrochemicals* hanya pada tahap studi dasar. Salah satu proyek berkelanjutan MIDEDEC ada di sektor *welding*. Indonesia sekarang sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerbitkan sertifikat keahlian. Untuk sektor makanan dan minuman, produsen lokal telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan dan pengemasan makanan. (Hadi, 2014, p. 2)

Pada pelaksanaannya, ada sebagian sektor yang sudah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah sektor pengelasan (*welding*) yang merupakan bagian dari pemanfaatan logam dengan melalui teknik penyambungan logam. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM serta teknologi industri yang terkait dengan pengelasan untuk mendukung industri alat berat, otomotif, elektronika dan industri perkapalan (Atmawinata & all, 2009:50). *Welding* memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dan produksi manufaktur. Bisa dikatakan *welding* dapat menjadi dasar dari industri lain yang berhubungan dengan penggunaan bahan dasar logam.

Sebelum adanya skema MIDEDEC, sektor pengelasan Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi berdasarkan *Welding Procedure Specification* (WPS) atau spesifikasi prosedur las serta kualifikasi juru las (*welder*). WPS merupakan prosedur tertulis tentang pengelasan yang sudah terqualifikasi untuk memberikan arahan dalam membuat pengelasan produksi (*production weld*) sesuai dengan persyaratan dari standar yang dipakai. Dalam kualifikasi WPS dan juru las mengacu pada standar ASME (*The American Society of Mechanical Engineers*) *Boiler and Pressure Vessel Code Section IX – Welding and Brazing*

Qualification Tahun 2010. *ASME Boiler and Pressure Vessel Code*, merupakan salah satu dari sekian banyak standar yang digunakan dalam berbagai industri manufaktur. Standar ASME *SECTION IX* (sembilan) berkaitan dengan kualifikasi juru las (*welder*) dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses las (*welding*). Setiap juru las (*welder*) yang mengelas menggunakan ASME IX harus dilakukan kualifikasi berdasarkan WPS yang sudah terqualifikasi atau *welder* tersebut dikualifikasi bersamaan dengan proses pengkualifikasian WPS. (Kholis, 2014)

Dalam hal ini sektor *welding* di Indonesia masih memiliki standar kualifikasi yang rendah dan berbeda-beda, termasuk SDM yang belum memiliki sertifikasi tenaga ahli pengelasan yang sama antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Karena pengelasan Indonesia belum memiliki buku rujukan standar dalam proses pengelasan, sehingga belum memiliki kualifikasi standar yang jelas (Atmawinata & all, 2008, p. 76). Sedangkan sektor ini merupakan sektor dasar untuk industri lain yang berbasis logam yang membutuhkan tenaga pengelasan. Maka kerjasama dalam sektor *welding* sangat penting untuk meningkatkan tenaga ahli Indonesia bahkan perusahaan Jepang juga membutuhkan tenaga ahli pengelasan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil satu kesimpulan pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana Realisasi Kerjasama Indonesia - Jepang dalam Skema *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) pada Sektor *Welding* Periode 2008-2012?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peranan Pemerintah Indonesia terhadap kemajuan industri manufaktur lokal pada sektor *welding* melalui skema MIDEC.

2. Menjelaskan bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam skema MIDEK pada sektor *welding*.
3. Menganalisis dampak kerjasama bilateral pada sektor *welding* di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
2. **Manfaat Praktis**, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki kaitan dengan Kerjasama Bilateral Indonesia – Jepang dalam *Manufacture Industry*.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 6 Bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi mengenai literature riview, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yaitu, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian dan waktu serta lokasi penelitian.

BAB IV: MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER

Bab keempat akan membahas tentang kerjasama Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan. Kemudian kompensasi Jepang dalam skema MIDEK. Membahas program-program MIDEK secara umum.

BAB V: KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-JEPANG DALAM SKEMA MIDEK PADA SEKTOR WELDING PERIODE 2008-2012

Bab kelima akan membahas mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia-Jepang dalam skema MIDEK sebagai kompensasi dari EPA pada sektor *welding* periode 2008-2012. Serta dampak dari realisasi kerjasama tersebut.

BAB VI: KESIMPULAN

Bab keenam akan menjadi penutup dari hasil penelitian penulis. Bab ini merupakan jawaban pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian dari analisis data yang diperoleh penulis pada BAB I, II, III, IV dan V.

DAFTAR PUSTAKA